

2019

# DIKLAT TEKNIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**LAPORAN HASIL KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN  
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

---

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan:

1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;
2. Kompetensi teknis dalam Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
3. Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

**II. DASAR PELAKSANAAN**

Dasar hukum penyelenggaraan Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran adalah untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan, Penganggaran dan Pelayanan Prima serta materi lainnya yang relevan guna menunjang pelaksanaan tugas dan menambah wawasan para pejabat pelaksana perencanaan di masing-masing SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

### IV. TEKNIK PELATIHAN

1. Ceramah;
2. Diskusi dan Tanya Jawab;
3. Power Point Presentation.

### V. MATERI DIKLAT

No	Materi	Jam Pelajaran
1	2	3
1	BUILDING LEARNING COMMITMEN	2
2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (UMUM)	2
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (TEKNIS)	2
4	PROSES PENYUSUNAN DAN PENENTUAN APBD	2
5	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	2
6	ANGGARAN BERBASIS KINERJA	4
7	ANALISIS STANDAR BELANJA	4
8	PENYUSUNAN RKA	4
9	INDIKATOR KINERJA DAN BELANJA	4
10	EVALUASI KINERJA	4
11	ANALISIS BELANJA MODAL	2
12	PERENCANAAN KAS SKPD DAN BUD	2
13	KLASIFIKASI BELANJA DAERAH	2
14	CERAMAH PIMPINAN	2
15	PELAYANAN PRIMA	2
	<b>TOTAL JAM PELAJARAN</b>	<b>40</b>

## VI. TENAGA PENGAJAR DAN PESERTA PELATIHAN

### 1. Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar pelatihan "Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah" adalah Pejabat Struktural, BPKP Perwakilan NTB dan praktisi yang memiliki Kompetensi dibidangnya.

### 2. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan "Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah" ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas perencanaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

## VII. PEMBIAYAAN

Biaya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Tahun Anggaran 2019) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah.

## VIII. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 akan diselenggarakan selama 5 (Lima) hari kerja, dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 15 Februari 2019, bertempat di Hotel Grand Royal Batujai Kabupaten Lombok Tengah.

## IX. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)

Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## X. LAMPRAN - LAPIRAN

Dokumentasi kegiatan dan sertifikat.

Praya, 19 Februari 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



## DOKUMENTASI KEGIATAN

### 1. Acara Pembukaan



## 2. Kegiatan Pembelajaran





### 3. Acara Penutupan

